

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera merupakan cita-cita bagi semua negara di dunia, tidak terkecuali bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Bagi Indonesia cita-cita tersebut tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam proses menciptakan masyarakat yang sejahtera harus dilaksanakan dengan pembangunan. Todaro (2013) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu tekad masyarakat untuk berupaya mencapai kehidupan yang lebih baik dalam peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok, peningkatan standar hidup secara ekonomi dan sosial.

Banyak masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang termasuk negara Indonesia, salah satunya yaitu permasalahan ketimpangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi akan menciptakan jurang pemisah antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Masalah distribusi pendapatan ini mengandung dua aspek, dikana spek pertama adalah bagaimana menaikkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan, sedangkan aspek yang kedua yaitu pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk. Permasalahan ketimpangan pendapatan ini sangat penting diperhatikan. Menurut Todaro (2013) ada tiga jawaban mengapa kita harus memerhatikan ketimpangan yang terjadi. Pertama, ketimpangan pendapatan ekstrem menimbulkan inefisiensi perekonomian. Kedua, ketimpangan pendapatan akan merusak stabilitas dan

solidaritas sosial. Ketiga, ketimpangan pendapatan umumnya dipandang tidak adil.

Adam Smith dan Marx (Damarjati, 2010) berpendapat bahwa persoalan pokok dari distribusi pendapatan adalah bagaimana hasil penjualan produk dibagi diantaranya upah, sewa dan laba. Ketimpangan distribusi pendapatan juga berkaitan dengan ketimpangan distribusi asset disuatu daerah, dimana tidak adanya aturan dalam kepemilikan asset sehingga masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi akan memiliki banyak asset seperti lahan. Sedangkan masyarakat berpendapatan rendah tidak memiliki asset atau lahan yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan adalah Ratio Gini (BPS, 2016). Nilai Ratio Gini berkisar antara nol dan satu, apabila Ratio Gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan sangat merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun, apabila Ratio Gini sama dengan satu maka menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan: (a) tinggi, bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12 persen bagian pendapatan; (b) sedang, bila bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12 persen hingga 17 persen bagian pendapatan; (c) rendah, bila bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17 persen bagian pendapatan (Kuncoro, 1997).

Ada beberapa faktor yang memengaruhi distribusi pendapatan. Stewart (2000) mengungkapkan upah minimum berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di beberapa Negara. Teori neo-klasik mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi tenaga kerja, pengangguran bertambah yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Arif (2018) dikatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu kemiskinan, PDRB dan UMP. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosa & Sovita (2016) dimana yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah PDRB, populasi penduduk, dan tingkat

pengangguran terbuka. Didalam penelitian ini penulis akan menggunakan variabel independen IPM, jumlah penduduk dan UMP untuk diteliti sebagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.

Faktor yang diduga mempengaruhi tingginya ketimpangan pendapatan adalah kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang tidak merata antar daerah menyebabkan daerah yang IPM-nya lebih tinggi akan memiliki kualitas manusia yang baik sehingga dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya hal inilah yang akan menimbulkan masalah kesenjangan antar masyarakat baik itu ketimpangan ekonomi maupun ketimpangan pendapatan (Brata, 2002). Rendahnya angka Indeks pembangunan manusia menyebabkan produktivitas yang di hasilkan oleh masyarakat juga menurun dan kemudian berdampak pada pendapatan masyarakat yang juga mengalami penurunan. namun apabila angka indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan akan membuat produktivitas masyarakat akan meningkat dan kemudian membuat pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan. Namun kenyataannya setiap daerah memiliki indeks pembangunan yang berbeda-beda pula sehingga membuat indeks pembangunan manusia juga berkaitan erat dengan adanya ketimpangan pendapatan (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017).

Indeks Pembangunan Manusia dan ketimpangan distribusi pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan, dimana dalam penelitian ini hubungan antara ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini dengan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari nilai IPM. Permasalahan yang terjadi disini adalah nilai IPM pada tiap daerah itu tentu berbeda-beda, seperti rata-rata nilai IPM Pulau Sumatera menunjukkan bahwa rata-rata nilai IPM antar provinsi di Sumatera terdapat perbedaan pada tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, rata-rata IPM di Sumatera tahun 2007 sebesar 72,0% dan pada tahun 2017 sebesar 70,6%. Dan selain itu perbedaan ini dapat menjadikan IPM sebagai salah satu alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan.

Jumlah penduduk juga dapat menjadi penyebab ketimpangan pendapatan disuatu daerah, jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak selalu

membuat pembangunan ekonomi berhasil namun juga bisa menjadikan permasalahan dalam suatu pembangunan. Hal ini terjadi ketika tingginya jumlah penduduk namun tidak diikuti dengan jumlah lapangan pekerjaan yang banyak (Sulistiawati, 2012). Jika hal ini terjadi maka akan menyebabkan tidak semua penduduk usia produktif dapat menyerap lapangan pekerjaan karena terdapat keterbatasan dalam ketersediaan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya membuat persaingan dalam mencari pekerjaan semakin sulit. Hal ini kemudian membuat para pekerja kelas rendah/buruh lebih memilih untuk dibayar lebih rendah dari pada harus menganggur yang kemudian membuat semakin melebarnya ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat.

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak akan menimbulkan masalah jika produktivitas penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Permasalahan akan muncul jika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut (Arsyad, 2010), bahwa pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah lain seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi dan lain sebagainya. Masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar Pulau, antar daerah, maupun antar daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antar sektor. Jumlah penduduk dan pertumbuhannya berbeda-beda disetiap daerah, perbedaan inilah yang dapat menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antar daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Sumatera pada tahun 2007 sebanyak 48 juta jiwa dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12,8 juta jiwa. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Sumatera sebanyak 56,91 juta jiwa.

Perbedaan tingkat upah juga menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Dalam teori ekonomi, upah secara umum dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan

seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Adanya perbedaan pendapatan yang diterima masing-masing masyarakat akan berpengaruh pada pemenuhan hidup setiap masyarakat. Pekerja-pekerja muda yang tingkat pendidikan dan keterampilannya relatif rendah akan memperoleh upah yang rendah pula, hal tersebut menyebabkan perbedaan pembagian pendapatan semakin panjang (Hasibuan, 1993). Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penetapan upah minimum yang bertujuan untuk melindungi para pekerja mendapatkan upah yang layak. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Sungkar, Nazamuddin, dan Nasir (2013) menunjukkan hasil bahwa penetapan upah minimum akan menciptakan ketimpangan pendapatan.

Diberlakukannya upah minimum berdampak harga tenaga kerja akan meningkat, sehingga permintaan akan tenaga kerja akan berkurang. Akibatnya banyak tenaga kerja yang akan menganggur. Pengangguran akan menciptakan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Jadi peraturan penetapan upah minimum oleh pemerintah dapat melindungi tenaga kerja serta dapat menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Perbedaan tingkat upah minimum di tiap daerah ini dapat menjadi penyebab ketimpangan pendapatan antar daerah, upah minimum yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya. Menurut data Badan Pusat Statistik upah minimum provinsi (UMP) tiap provinsi di Sumatera berbeda-beda. Pada tahun 2007 upah minimum provinsi (UMP) Aceh merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera yaitu sebesar Rp. 850,000 sedangkan Lampung memiliki UMP terendah dibandingkan dengan provinsi lain yaitu sebesar Rp. 555,000. Dan pada tahun 2017 upah minimum provinsi (UMP) Kep. Bangka Belitung merupakan yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 2,538,673 sedangkan Bengkulu memiliki UMP terendah dibandingkan dengan provinsi lain yaitu sebesar Rp. 1,730,000.

Distribusi pendapatan yang merata akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum namun sebaliknya jika distribusi pendapatan tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Sistem distribusi yang tidak proporsional hanya akan menciptakan kemakmuran bagi

golongan tertentu saja, sehingga ini menjadi isu yang sangat penting dalam menyikapi tingginya angka kemiskinan hingga saat ini. Untuk itulah peneliti tertarik menganalisis masalah distribusi pendapatan antar daerah Provinsi di Sumatera dalam skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Sumatera Tahun 2007 - 2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi di Sumatera tahun 2007-2017 ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi di Sumatera tahun 2007-2017 ?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi (UMP) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi di Sumatera tahun 2007-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi di Sumatera tahun 2007-2017.
2. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi di Sumatera tahun 2007-2017.
3. Menganalisis pengaruh upah minimum provinsi (UMP) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi di Sumatera tahun 2007-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan mahasiswa dan saya sendiri tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan antar suatu daerah.
2. Sebagai bahan rujukan atau tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan dalam menetapkan kebijakan dan bagaimana sebaiknya pemerintahan mengambil kebijakan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah :

1. Variabel dependent yang diteliti adalah ketimpangan distribusi pendapatan dengan model gini ratio.
2. Variabel independent yang diteliti adalah indeks pembangunan manusia (IPM), jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi (UMP).
3. Objek penelitian adalah seluruh Provinsi di Pulau Sumatera.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan tinjauan teori yang merupakan dasar teoritis penelitian, kerangka pemikiran yang digambarkan dalam sebuah bagan dan uraian hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang variable penelitian dan operasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini beserta penjelasan tentang metode pengumpulan data, serta uraian tentang metode analisis yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN UMUM VARIABEL

Pada bab ini akan menguraikan deskripsi statistik dari masing-masing variabel perkembangannya.

BAB V TEMUAN EMPIRIS

Dalam bab ini memuat hasil pembahasan dari analisa data yang telah diteliti.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.

